



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1170>

Vol. 7 No. 2 (2024)
pp. 870-890

Research Article

Analisis Historis Kebijakan Fiskal Islam Fathimiyah Mesir, Mamaalik, Safawi Persia, dan Mughol India

Dodi Yarli Rusli¹, Yadi Janwari², Sofyan Al-Hakim³

1. IAI Tazkia Bogor; dodiyarli@gmail.com 
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; yadijanwari@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; sofyanalhakim@uinsgd.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 24, 2024
Accepted : March 28, 2024

Revised : February 18, 2024
Available online : April 30, 2024

How to Cite: Dodi Yarli, Yadi Janwari and Sofyan Al-Hakim (2024) "Historical Analysis of the Islamic Fiscal Policies of Fatimid Egypt, Mamalik, Safavid Persia, and Mughol India", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(2), pp. 870-890. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1170.

Historical Analysis of the Islamic Fiscal Policies of Fatimid Egypt, Mamalik, Safavid Persia, and Mughol India

Abstract. The history of fiscal policy in Islam during the Fatimid and Mamaalik periods in Egypt, the Syafawiyah in Persia, and the Mughals in India, can be divided into two main phases: the glory phase and the decline phase. In the glory phase, historical records show that fiscal management under the governments of these caliphates generated revenue surpluses. This situation contributes to the country's economic stability and security. The Fatimids, Mamaaliks, Syafawiyahs, and Mughols in India implemented fiscal policies that encouraged increasing state income from diverse sectors such as agriculture, trade, and industry. The state's largest sources of income come from taxes, *tīmār*, *muḳāṭa'a*, *waqf* and *ghanimah*. High income is used to support the country's progress through financing

territorial expansion, infrastructure development, education and health. However, during the decline phase, the Fathimiyah, Mamaalik, Syafawiyah and Mughol experienced budget deficits. Decreasing state income, failure to westernize the economy, high war costs, and high state debt are factors causing deficits in their fiscal policy.

Keywords: Fiscal Policy of the Fatimid, Mamaalik, Syafawi, and Mughol Monarchies

Abstrak. Sejarah kebijakan fiskal dalam Islam selama masa Fathimiyah dan Mamaalik di Mesir, Syafawiyah di Persia, serta Mughol di India, dapat dibagi menjadi dua fase utama: fase kejayaan dan fase kemunduran. Pada fase kejayaan, catatan sejarah menunjukkan bahwa manajemen fiskal di bawah pemerintahan kekhalifahan-khalifahan tersebut menghasilkan surplus pendapatan. Keadaan ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Fathimiyah, Mamaalik, Syafawiyah, dan Mughol di India menerapkan kebijakan fiskal yang mendorong peningkatan pendapatan negara dari sektor-sektor beragam seperti pertanian, perdagangan, dan industri. Sumber pendapatan terbesar negara berasal dari pajak, *tīmār*, *muḳāṭa'a*, perwakafan, dan *ghanimah*. Pendapatan yang tinggi digunakan untuk mendukung kemajuan negara melalui pembiayaan perluasan wilayah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, pada fase kemunduran, Fathimiyah, Mamaalik, Syafawiyah, dan Mughol mengalami defisit anggaran. Penurunan pendapatan negara, kegagalan westernisasi perekonomian, biaya perang yang tinggi, dan tingginya utang negara menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya defisit dalam kebijakan fiskal mereka.

Kata kunci: Kebijakan Fiskal MonarkiFatimiyah, Mamaalik, Syafawi, dan Mughol

PENDAHULUAN

Peradaban Islam telah membentuk fondasi yang unik dan tak tertandingi, memberikan berbagai petunjuk yang memegang peran kunci dalam proses pertumbuhannya. Keistimewaan dan nilai-nilai tersebut memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan peradaban, dengan beragam perbedaan yang berharga, perubahan, dan interpretasi yang jelas dari berbagai peradaban terdahulu (AsSirjani, 2011: 23). Hal tersebut mencerminkan keberadaan Islam di berbagai wilayah, termasuk di Mesir, tempat di mana Islam berkembang pesat. Bahkan, Mesir sebagai pusat Islam mampu mencapai puncak kejayaannya.

Dalam catatan sejarah peradaban Islam, MonarkiFatimiyah pada abad ke-10 tercatat sebagai salah satu monarkiyang meraih pencapaian gemilang. Monarki ini pertama kali dibentuk oleh Uubaidillah al-Mahdi, yang mulai berkuasa pada tahun 909 Masehi dan berakhir pada tahun 1171 M (Esposito, 2004: 44). Sebagai pendiri monarkiFatimiyah, Ubaidillah al-Mahdi, yang merupakan cucu Ismail bin Ja'far al-Sadiq, termasuk dalam pengikutSyi'ah Isma'iliyah. Isma'iliyah adalah salah satu sekte Syi'ah yang meyakini bahwa Isma'il adalah imam setelah Ja'far al-Sadiq.

Munculnya DaulahFatimiyah sebagai sebuah DaulahSyiah dalam dunia Islam, dan perannya yang antagonis terhadap penguasa Muslim pada masa itu, seperti DaulahAbbasiyah diBaghdad (TimurTengah) dan Monarki Umayyah di Andalusia (Spanyol), merupakan fenomena yang penting bagi umat Islam (Hitti, 1974: 23). Selain itu, keberhasilan Daulah Fatimiyah dalam mengembangkan kehidupan warganya, sistem administrasi, pengetahuan, seni, dan arsitektur, serta kemundurannya dan berbagai penyebabnya, juga merupakan aspek-aspek yang patut diketahui.

Dinasti Fatimiyah dikenal dengan proses pergantian kepemimpinan yang

disebut dengan monarki, di mana kepemimpinan beralih melalui sistem penunjukan langsung. Meskipun sistem politiknya mengalami banyak perubahan karena pergantian kepemimpinan turun temurun, banyak yang berpendapat bahwa sistem politik MonarkiFatimiyah dapat dianggap sebagai moonarki otokratis (Karim, 2012: 45).

Aspek menarik dari DaulahFatimiyah yang perlu diperhatikan dalam konteks politik dan kenegaraan adalah upayanya untuk menggabungkan agama dan pemerintahan. Ini terlihat dalam sejarah kelahirannya, di mana pemimpinnya dianggap sebagai Imam Mahdi. DaulahFatimiyah tidak hanya menentang kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad dan Bani Umayyah di Spanyol, tetapi juga mengklaim bahwa mereka memiliki otoritas tertinggi untuk memerintah seluruh kerajaan Islam (Sunanto, 2007: 65). Namun, pada kenyataannya, pola kepemimpinan oleh para imamFatimiyah sering kali mencerminkan sikap materialistik dihadapan masyarakat dalam bentuk pencapaian kemakmuran.

METODE PENELITIAN

Secara garis besar, metodologi penelitian dapat dijelaskan sebagai suatu pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan maksud dan tujuan tertentu. Pendekatan ilmiah ini mencirikan kegiatan penelitian yang berdasarkan pada karakteristik ilmu pengetahuan, seperti rasional, empiris dan sistematis. Rasionalitas menunjukkan bahwa penelitian dilakukan dengan makna yang dapat dicapai melalui dayanalar manusia. Empiris mencerminkan penggunaan metode yang dapat diamati oleh indera manusia, memungkinkan orang lain untuk mengamati dan memahami metode yang digunakan. Sistematis merujuk pada proses penelitian yang mengikuti langkah-langkah logis tertentu.

Metode ini menerapkan pendekatan deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan sejarah. Yang mana melibatkan pemeriksaan dan analisis kritis terhadap catatan serta peninggalan masa lampau dalam bentuk tulisan tertulis. Dan semua itu, berdasarkan bentuk, berbagai peristiwa, suasana, dan durasi topik yang relevan, pion-pion yang dianalisis akan diuraikan dan atau disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fatimiyyah Mesir

1. Berdirinya DaulahFatimiyyah

Sebelum meninggal pada tahun 874 M, Abdullah bin Maimon menunjuk Abu Abdullah al-Shi'i, seorang pengikut penuh semangat dari Yaman, sebagai pemimpin gerakan Syi'ah Ismailiyah (S.M. Amin, 2015: 21). Abu Abdullah al-Shi'i kemudian mengklaim dirinya sebagai pelopor al-Mahdi.

Abu Abdillah Shi'i melakukan perjalanan ke Afrika Utara dan berhasil mendapatkan dukungan 2 suku barbar Kitama dan Zirid, gubernur provinsi Ifrikiya, berkat pidatonya yang luar biasa dan antusias. Philip K. Hitti menyatakan bahwa setelah memperoleh kekuasaan yang kuat, Abu Abdullah Shi'i mengirim surat kepada Imam Ismaili, yakni Sa'id bin Muhammad al-Habib atau al-Husain bin Ahmad, untuk datang ke Afrika Utara. Abu Abdillah al-Shi'i kemudian menunjuk Sa'id sebagai penguasa.

Tepatnya padatahun 909 M, Sa'id berhasil merrebut kekuasaan, mengusir pemimpin terakhir Daulah Aglabia, Ziadator III, dari Tunis, dan mendudukinya sendiri. Sa'id kemudian diangkat sebagai khalifah pertamadengan gelar Ubaidillah al-Mahdi (Sulasman, 2013: 67). Atas dasar itu, berdirilah pemerintahan Daulah Fatimiyyah pertama di Afrika, dan al-Mahdi menjadikhalifah dari Daulah tersebut yang berkedudukan di Raqqodah daerah Qairuwan Maghrib. Ibu kota pemerintahan kemudian pindah ke pulau Jumamah, yang dinamakan kota al-Mahdiyyah setelah Ubaidillah al-Mahdi memelopori pembangunan di pulau tersebut pada tahun 303 H/1005 M.

Daulah Fatimiyyah mendapatkan namanya dari putri Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wasallam, Fatimah al-Zahra dan juga istri Ali bin Abi Thalib ra. Ubaidillah al-Mahdi mengklaim sebagai keturunan Ali Ibn Abi Thalib dan Fatimah al-Zahra melalui Ismail, putranya al-Sadiq. Pengangkatan ini memperkuat anggapan dan sekaligus legitimasi Daulah sebagai penguasa yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan dan memerintah seluruh kerajaan Islam. Kekuasaan Daulah Fatimiyyah berlangsung selama 262 tahun (296-567H/909-1171M).

2. Perluasan Daerah Kekuasaan

Mesir menjadi pusat kekuasaan yang melibatkan wilayah-wilayah seperti Afrika Utara, Sisilia, pantai Laut Merah Afrika, Palestine, Siria, Yemen, dan Hijaz di bawah kepemimpinan Ubaidillah. Pemerintahannya didirikan di Istana Aghlabiyah, Raqqodah, di pinggiran Kota Qairuwan. Ubaidillah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang sangat cakap dan berbakat, memperluas kekuasaan hingga mencakup wilayah Afrika dari Maroko hingga perbatasan Mesir (Lapidus, 2014: 65).

Sesudah kematian Ubaidillah Mahdi padatahun 934 M, putranya Abual-Qa'im mewarisi gelar-Qa'im dan memerintah selama 15 tahun. Pada tahun 935 M, al-Qa'im mengirim armadanya untuk menyerang pantai utara Perancis dan berhasil merebut pantai Genoa dan Calabria. Namun, al-Qa'im meninggal padatahun 949 M saat berusaha menaklukkan Mesir. Penerusnya adalah putranya Mansur, yang berhasil mengalahkan tentara Abu Yazd al-Makaddi Mesir. Setelah kematian Mansur, tahtanya diambil alih oleh Abu Tamim-Ma'ad, yang bergelar al-Mu'iz.

3. Ideologi Monarki Fatimiyyah

Setelah secara resmi mendeklarasikan diri sebagai Daulah baru, Daulah Fatimiyyah memulai tugas mereka dengan memperkuat kedudukan mereka dihadapan kaum Muslimin bahwa mereka adalah keturunan langsung dari putri Nabi dan istri Ali bin Abi Thalib, yaitu Fatima al-Zahra. Mereka mengklaim hak mereka untuk memerintah berasal dari Tuhan dan menyatakan diri sebagai pemimpin Islam yang sah. Daulah Fatimiyyah juga mencerminkan simbolisme Abbasiyah, Bizantium, otoritas filosofis, dan politik Ismailiyah. Mereka menyatakan diri sebagai imam yang sejati dan menentang tradisi tersembunyi Syi'ah dari imam-imam Syi'ah yang mendahuluinya (Lapidus, 2014: 32). Citra diri sebagai lembaga khalifah dan imam yang sah menegaskan kesinambungan otoritas politik dan spiritual yang berasal dari Nabi, sejalan dengan keyakinan Syi'ah Ismailiyah, pendiri Daulah Fatimiyyah, bahwa Tuhan mewakili diri-Nya di dunia ini.

Konsep imamah menjadi landasan sistem pemerintahan dalam Daulah Fatimiyah. Dalam pandangan mereka, imamah dianggap sebagai fondasi utama agama dan prinsip dasar Islam. Bagi penganut Syi'ah, seseorang yang tidak memiliki imam dianggap sesat, dan meninggal dalam kondisi ini dianggap sebagai kafir dan munafik (Salim, 2015: 55). Keabsahan imamahnya dapat terjadi melalui Nash, yakni penetapan atau wasiat. Keyakinan ini menyatakan bahwa kepemimpinan khalifah dimulai ketika Nabi menunjuk Ali sebagai imam di Ghadir Khum. Apabila seorang imam melanggar kerangka ini, dapat menyebabkan perpecahan dalam aliran dan situasi politik yang berpotensi mengguncang dasar negara.

4. Masa Keemasan dan Kontribusi Fatimiyah Terhadap Peradaban Islam

Daulah Fatimiyah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap peradaban Islam, khususnya terkait kehidupan masyarakat, sistem administrasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Mereka menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Monarki Fatimiyah membangun Masjid Al Azhar, yang tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Pada akhirnya, masjid ini berkembang menjadi Universitas AlAzhar, yang menjadi salah satu universitas Islam tertua dan paling dihormati oleh ulama Sunni. Universitas ini menjadi pusat pembelajaran yang melibatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan menjadi tempat belajar bagi banyak ulama terkemuka. Monarki Fatimiyah juga mendirikan perpustakaan Dar al-Ilmi yang berisi berbagai buku ilmiah, dan perpustakaan ini dipadukan dengan Dar al-Hikmah.

Dengan demikian, Monarki Fatimiyah berperan besar dalam memajukan ilmu pengetahuan, mengembangkan pendidikan, dan menciptakan lingkungan intelektual yang mendukung kemajuan pengetahuan di dunia Islam. Upaya mereka dalam membangun institusi pendidikan dan menyediakan akses ke literatur ilmiah berpengaruh dalam perkembangan peradaban Islam pada masa itu.

5. Ilmu Fiqih, Fiskal, Ekonomi serta Perdagangan

Pada periode Monarki Fatimiyah di Mesir, keilmuan fiqih mengalami perkembangan signifikan dengan munculnya beberapa tokoh ahli fiqih dari berbagai madzhab. Di antara tokoh-tokoh tersebut, terdapat ulama beraliran Malikiyyah seperti Abu Baakar anNi'mall (w.380) dan Abdurahman bin Abdulloh al Ghafiqi al Misri, yang terkenal sebagai penulis Musnad al-Muwattho'. Mesir juga menjadi pusat pengembangan Madzhab As Syafi'i, dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Nasr bin Basshar (w.477) dan Qadi Ali bin al-Husain al Khul'i.

Dalam konteks fikih Ahlus Sunnah, Monarki Fatimiyah juga melihat perkembangan di kalangan kelompok Syi'ah Isma'iliyyah. Tokoh-tokoh seperti An Nu'man bin Muhammad bin Hayaa'un al-Maghriibi dan Ya'qub bin Kaas menjadi perwakilan fiqh dalam lingkup tersebut.

Dalam bidang ilmu bahasa dan Nahwu, Daulah ini menunjukkan perhatiannya dengan menugaskan pakar bahasa khusus untuk mengoreksi setiap koleksi dari kitab-kitab koleksi mereka. Beberapa ulama terkenal dalam bidang ini pada masa Daulah Fatimiyah antara lain Al-Qazas an-Nahwi dan Al-Muhib an-Nahwi.

Selain itu, Monarki Fatimiyah memberikan kontribusi besar terhadap kemakmuran ekonomi Mesir dan dinamisme budayanya. Hubungan perdagangan dengan dunia luar (non-Islam), termasuk India dan negara-negara Kristiani Mediterania, berkembang pesat. Fustat menjadi pusat perdagangan utama, menjadi kota perdagangan yang mengirim dan menerima barang dari berbagai wilayah. Mesir pada masa ini juga mengalami kemajuan di sektor farming, terutama di kawasan pinggiran sungai Nil dan lahan pertanian yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, Monarki Fatimiyah tidak hanya berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan fiqih, tetapi juga menciptakan kondisi ekonomi yang makmur dan beragam budaya yang dinamis di Mesir pada masa pemerintahannya.

Sungai Nil memegang peran vital dalam kelangsungan hidup masyarakat Mesir, namun fluktuasi airnya dapat menjadi tantangan. Kadang-kadang, Sungai Nil mengalami kekurangan air, menyulitkan akses terhadap suplai air bersih, pakan hewan ternak, dan irigasi tanaman. Sebaliknya, terkadang sungai ini mengalami pasang yang tinggi, menyebabkan banjir yang dapat merusak tanaman dan lahan pertanian. Untuk mengatasi variasi ini, masyarakat Mesir mengembangkan strategi adaptasi yang efektif.

Salah satu cara yang digunakan adalah pembangunan gundukan dan tanggul setinggi banjir untuk melindungi tanah pertanian dari dampak banjir yang merugikan. Ini membantu menjaga tanah tak tersentuh dan mencegah kerusakan tanaman akibat air berlebih.

Pertanian di Mesir mengikuti pola musim Sungai Nil, yang dibagi menjadi dua musim:

- a. Musim Dingin (periode Desember-Maret): Pada musim ini, air sungai mengalir dari arah Sungai Nil. Pada periode ini, masyarakat menanam tanaman seperti gandum, kapas, dan pohon ghoni yang membutuhkan banyak air.
- b. Musim Panas (periode April-Juli): Disaat air Sungai Nil mulai surut, masyarakat menggunakan alat untuk menggangkat air dan mengairi sawah. Pada musim ini, tanaman seperti padi, tebu, semangka, anggur, jeruk, dan tanaman lainnya ditanam.

Dengan mengatur waktu penanaman berdasarkan musim Sungai Nil, masyarakat Mesir dapat mengoptimalkan hasil pertanian mereka dan mengatasi tantangan yang muncul akibat fluktuasi air sungai tersebut.

Mamaalik

Monarki Mamaalik di Mesir memiliki warisan peradaban yang memiliki dampak global dalam konteks sejarah. Konsep kosmopolitanisme Islam yang diterapkan di bawah pemerintahan Mamaalik menciptakan suatu realitas sejarah di mana terbentuknya prinsip-prinsip politik, ekonomi, dan budaya tidak terbatas oleh sistem dan mekanisme yang rumit. Menurut Toynbee (1965: 1355), MonarkiMamaalik mewarisi peradaban yang berfungsi sebagai peradaban global.

Kosmopolitanisme Islam di bawah pemerintahan Mamaalik menciptakan suatu kerangka yang menyatukan berbagai aspek kehidupan, menciptakan ruang untuk pembentukan prinsip-prinsip yang bersifat inklusif. Sejarah tersebut menunjukkan

bahwa Mamaalik membuka jalan bagi formulasi kembali prinsip-prinsip politik, ekonomi, dan budaya tanpa dibatasi oleh sistem yang terlalu kompleks.

Dalam konteks modern, jika umat Islam kini dihadapkan pada kebutuhan untuk merekonstruksi pola kehidupan mereka, hal tersebut mungkin mencakup pengulangan sejarah, yakni merumuskan kembali pengalaman yang telah ada dalam masyarakat Muslim. Ini mencerminkan kebutuhan untuk meninjau kembali prinsip-prinsip yang telah ada dalam sejarah Islam, menggali nilai-nilai yang relevan, dan mengadaptasinya ke dalam konteks kehidupan masa kini.

Membahas Monarki Mamaalik sebagai suatu bentuk pengulangan sejarah memberikan dampak positif dalam meringankan beban psikologis reaktualisasi pengalaman. Hal ini melibatkan pergeseran cakrawala dari wawasan yang ada sekarang ke wawasan yang lebih komprehensif. Dalam pembahasan mengenai Monarki Mamaalik, fokus pada sisi substansi menjadi penting, bukan hanya pada realitasnya. Oleh karena itu, diperlukan penegasan-penegasan yang dilakukan melalui analisis kritis dan penelitian kembali berbagai dukungan historis yang ada.

Dalam konteks ini, melihat kondisi objektif Monarki Mamaalik di Mesir menuntut sikap inklusivisme. Hal ini karena mengabaikan aspek sejarah yang merupakan rangkaian pengalaman manusia dalam menjawab tantangan hidup, terlepas dari apakah mereka menghadapi kegagalan atau keberhasilan, dapat dianggap sebagai suatu absurditas.

Berdasarkan penelusuran sejarah, pertengahan abad ke-13 dapat dianggap sebagai periode krisis. Monarki Mamaalik menghadapi tantangan zaman dan terpuruk dalam jeratan perubahan zaman. Eksistensi kaum Mamaalik saat itu terjebak dalam zaman kehancuran pemerintahan Islam secara umum. Meskipun prakarsa kaum Mamaalik dalam membentuk sistem pemerintahan lebih terpusat pada skala kecil, yaitu Mesir sebagai negara, prestise mereka dalam memperkuat rezim dapat diakui melalui proyek percontohan dalam membentuk suatu negara yang berskala besar (Nasution, 1996: 112).

Secara umum, model pemerintahan yang diterapkan oleh Monarki Mamaalik dapat dijelaskan sebagai "oligarkhi," yang artinya pemerintahan dijalankan oleh sekelompok kecil orang dari golongan tertentu (Kamus Besar, 1989: 625). Dalam prakteknya, model ini melibatkan banyak personel militer sebagai basis pertahanan dan pemenuhan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga fundamentalitas sebuah negara.

Pada masa Monarki Ayyubiyyah di Mesir, terdapat organisasi rakyat yang terorganisir dengan potensi untuk membentuk kekuatan militer yang signifikan. Militerisasi Mesir dipimpin oleh budak-budak yang tergabung dalam paguyuban-paguyuban. Dalam sejarah kekuasaan Ayyubiyyah, militer budak menjadi garda terdepan sebagai elit politik yang unggul, baik dari segi fisik maupun popularitasnya.

Menurut M. Lombard, militer budak ini dijadikan pengawal pribadi (bodyguard) Sultan Ayyubi dan menjadi cikal bakal untuk pembentukan Monarki Mamaalik (Lombard, 1975: 195). Secara lebih definitif, istilah Mamaalik merujuk kepada keturunan budak-budak dari berbagai jenis dan kebangsaan yang membentuk rezim baru di Mesir (Syalaby, 1977: 197). Pembentukan negara independen yang diprakarsai oleh para budak ini merupakan fenomena yang mencolok. Perlakuan

istimewa dan prioritas yang diberikan oleh Sultan Ayyubi kepada Mamaalik pada akhirnya meruntuhkan struktur birokrasi Monarki Ayyubiyah. Terutama setelah Mu'iz Aybak (1250-1257 M.) muncul sebagai tokoh penting dari kelompok Mamaalik, mereka mendominasi pemerintahan Mesir (Briue's, 1987: 216). Dalam waktu singkat, pamor Mamaalik menjadi terkenal di seluruh dunia Timur. Dengan dukungan para sultan Mamaalik, terbuka peluang bagi terbentuknya suatu monarki yang berkelanjutan.

Pada awal Monarki Mamaalik, keberadaannya sangat diakui berkat prestasi luar biasa mereka dalam menahan serangan penjajah dan pasukan Salib. Tokoh-tokoh seperti Syaf al-Din Qutuz (1259-1260 M) dan Zahir-Baybars (1260-1277 M) membela Mesir melawan serangan Hulagu dan pasukan Salib dengan gigih. Pertempuran Ain Jalut (Goliath's Spring), yang terjadi di Palestina pada tahun 1260 M, menjadi saksi bisu keberanian militer Monarki Mamaalik (Saunders, 1980: 182).

Tentang pembentukan Monarki Mamaalik, sejarawan memiliki pandangan berbeda. Harun Nasution, misalnya, menyatakan bahwa kemenangan dalam Pertempuran Ain Jalut meningkatkan posisi Zahir Baybars menjadi sultan pertama Monarki Mamaalik. Dalam pengertian sejati suatu dinasti, yaitu otoritas berada pada sultan yang dikendalikan oleh para amir dan birokrasi (Nasution, 1985: 81).

Monarki Mamaalik menguasai wilayah Mesir dan Siria selama 267 tahun, dari abad ke-13 hingga awal abad ke-16, mulai dari tahun 1250 M hingga 1517 M. Zaman Mamaalik dianggap sebagai periode pertengahan (*middle ages*), dan Monarki Mamaalik memanfaatkan masanya untuk menciptakan sejarah Mesir Islam (Goitein, 1968: 245). Kekuasaan Mamaalik dibagi menjadi dua periode, yaitu Monarki Mamaalik Bahriyah (*Sea Mamluks*) dari 1250 hingga 1382 M, dan Monarki Mamaalik Burjiyah (*Mamluks of the Citadel*) dari 1382 hingga 1517 M. Monarki Mamaalik Burjiyah dikenal karena para Mamaaliknya dilatih secara militer dan tinggal dibenteng (*citadel*) yang bermenara (*burj*) atas inisiatif Sultan al-Mansur Sayf al-Din Qalawun (1280-1290 M.), dan ini dipertahankan oleh al-Zahir Sayf al-Din Barquq (1382-1399). Ada perbedaan latar belakang di antara Mamaalik dalam beberapa aspek (Smith, 1989: 250).

Masa Perkembangan

Kemenangan Monarki Mamaalik atas pasukan Hulagu memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan politik mereka. Monarki Mamaalik didirikan dengan sistem hirarki yang kompleks, di mana para mamluk sultan berada dipuncak struktur kekuasaan. Militer, yang dikomandoi oleh sultan, mampu mengatasi sisa-sisa kekuasaan Ayyubiyah di Siria. Beberapa pasukan Salib di Levant dan kelompok Ismaili di Siria berhasil dihancurkan. Wilayah Monarki Mamaalik berkembang hingga mencakup Cyrenaica (*Barqah*) di Barat, Nubia dan Hijaz di Selatan, serta Sisma (*Gunung Taurus*) di Utara (Bosworth, 1993: 190).

Dengan fondasi yang diletakkan oleh Baybars, para sultan Mamaalik terus memperkuat kekuasaan mereka. Para sultan dan amir, yang juga merupakan Mamaalik, membentuk pasukan pribadi seperti al-Mamaalik al-Sutaniyah dan al-Mamaalik al-Umara (Brill's, 1987: 217). Selain kelompok budak, terdapat juga pasukan non-budak (*halqah*) yang terdiri dari pelarian tentara Mongol (*al-Wafidiyah*).

Sistem pengambilan calon tentara non-Muslim oleh Monarki Mamaalik diatur dengan selektifitas tinggi, sehingga loyalitas mereka dapat dijamin (Pipes, 1993:11). Karier awal dalam militer sangat penting untuk mendukung stabilitas negara, meskipun di kemudian hari terkadang terjadi persaingan di antara mereka. Monarki Mamaalik menjalin perjanjian dengan raja-raja Mongol dan Eropa, seperti perjanjian dagang dengan Karel dari Anjou, raja Sisilia, dan kakak dari Louis IX. Selanjutnya, mereka menjalin perjanjian dengan James dari Aragon dan Alfonso dari Sevilla. Monarki Mamaalik membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia (Hitti, Tt.: 676).

Perdagangan bebas lintas batas negara membantu memperbaiki sektor ekonomi Mesir. Perdagangan internasional, terutama antara Laut Tengah dan Samudera Hindia, memainkan peran kunci dalam mendukung perekonomian pemerintahan. Perdagangan dengan Eropa, khususnya perdagangan antara Eropa dan Timur Jauh melalui Timur Dekat, menjadi kebutuhan penting bagi Mesir, baik dalam hal perdagangan maupun pajak yang dihasilkan dari perdagangan tersebut. Selama periode kekuatan Monarki Mamaalik, pemerintah memberikan perlindungan dan dorongan kepada perdagangan, membawa Mesir ke arah pembangunan baru dalam seni dan tulisan. Kemajuan ekonomi mendukung perkembangan seni dan budaya, termasuk seni bangunan, model keramik, ukiran, dan kerajinan artistik lainnya. Kairo, sebagai pusat Monarki Mamaalik, telah dan masih menjadi salah satu kota yang indah dalam dunia Muslim (Lewis, 1988: 167).

Baybars adalah seorang pemimpin yang serius dalam pembangunan. Dia aktif merekonstruksi jaringan komunikasi dan transportasi, baik antar kota maupun antar manca negara. Monarki Mamaalik di bawah kepemimpinan Baybars melakukan rehabilitasi daerah secara periodik. Mereka menggali terusan-terusan, membangun pelabuhan-pelabuhan, dan menghubungkan kota Kairo dengan Damaskus, mencapai prestasi besar dalam pengembangan infrastruktur. Baybars dan para penguasa Mamaalik lainnya secara rutin menjalankan dinas pos, memperbaiki pekerjaan umum, mempercantik masjid-masjid, dan mendirikan badan-badan keagamaan serta badan-badan amal. Bangunan monumental, seperti masjid dan sekolah, dinisbahkan pada nama Sultan Baybars sendiri (Hitti, Tt.: 229).

Mesir, terutama Kairo, menjadi pusat penting bagi perkembangan intelektual dan kebudayaan Islam, dengan bahasa Arab sebagai basisnya (Nasution, 1992: 610). Pada zaman Mamaalik, Kairo menjadi tempat kelahiran penulis terkenal, seperti Ibnu Taymiyah yang juga seorang pemikir reformis, Ibnu Khaldun, al Suyuthi, dan banyak ilmuwan lain yang terkenal. Ilmu pengetahuan yang berkembang di Mesir mencakup bidang sejarah, kedokteran, matematika, dan agama (Fahrudin, 1985: 156). Kemajuan ilmu pengetahuan ini terjadi dengan cepat karena Mesir menjadi tempat perlindungan bagi para ilmuwan asal Baghdad yang melarikan diri dari serangan Mongol (Margoliouth, 1977: 158).

Masa Kejenuhan

Pada akhirnya, pemerintahan militer oligarki Monarki Mamaalik mengalami masa jenuh, di mana solidaritas di antara mereka semakin melemah. Keberlanjutan solidaritas yang memberikan kekuatan kepada Mamaalik menjadi semakin rapuh

(Pipes, 1993: 159). Perubahan kekuatan antarbangsa membuat jalur-perdagangan utama dikuasai oleh feodalisme asing (Yatim, 1996: 128). Situasi ini membuat penderitaan Monarki Mamaalik semakin kompleks.

Pada tahun 1517 M, pasukan Usmani menyerbu dan menghancurkan pasukan militer Mamaalik. Alasan utamanya adalah Sultan Salim ingin merebut Mesir untuk memperluas wilayah kekuasaannya (Hassan, 1989: 318). Ancaman dari luar, terutama dari Kekaisaran Ottoman, dapat dihindari jika para sultan Mamaalik dapat mengantisipasi dengan baik. Sejarah mungkin akan berbicara lain jika kelemahan-kelemahan ini diatasi sejak awal. Kelemahan-kelemahan yang melemahkan kekuasaan Monarki Mamaalik dapat diidentifikasi sejak awal berdirinya, tetapi kelemahan yang sesungguhnya terlihat pada periode kedua, setelah wafatnya Mu'ayyad Shaukh (w. 1421 M.). Para sultan yang memerintah Mesir dalam periode tersebut terbukti lemah (Hassan, 1989: 313).

Kebobrokan mentalitas dalam kepemimpinan Mamaalik tidak sebanding dengan prestasi spektakuler yang telah mereka capai. Revivalisme kekhalifahan Abbasiyyah di Mesir menunjukkan kebobrokan mental lebih bersifat-politis daripada religius, dengan tujuan memperluas wilayah kekuasaan melalui patron khalifah. Pemimpin yang korup cenderung menciptakan kelesuan jiwa, dan masyarakat kehilangan hegemoni rohaniah. Jika spiritualitas pemimpin tidak berkembang, kreativitas intelektual yang tinggi tidak akan muncul. Dalam kasus ini, stagnasi intelektual dapat dilihat melalui perbandingan paham yang diadopsi oleh setiap sultan.

Perekonomian yang tidak berkembang disebabkan oleh kelalaian para sultan dalam kebijakan fiskal. Politik fiskal yang hanya berorientasi pada penarikan uang dari perdagangan transit tanpa pertimbangan konsekuensinya berdampak pada keruntuhan perekonomian rakyat. Pajak yang tinggi dan devaluasi uang negara berdampak pada penurunan pendapatan per kapita, merugikan rakyat secara signifikan. Monopolisasi produksi, baik dalam negeri maupun luar negeri, juga berdampak negatif pada rakyat. Kesalahan-kesalahan ini berpotensi menghancurkan kelangsungan negara (Hassan, 1989: 322).

Ketika mengenang kehancuran Monarki Mamaalik, sejumlah pakar sejarah menyebutkan bahwa faktor alam, seperti wabah penyakit dan kelaparan, mungkin ikut berperan dalam kejatuhan mereka. Mesir memang pernah dilanda wabah penyakit dan bahaya kelaparan yang sangat merugikan ribuan umat. Namun, penting untuk melakukan identifikasi lebih lanjut dan mengeksplorasi penyebab-penyebab yang lebih kompleks.

Jika hasil penelitian mengindikasikan adanya kelaparan, maka dapat disimpulkan bahwa wabah penyakit menjadi konsekuensi dari situasi tersebut. Dalam konteks ini, wabah penyakit bisa menjadi dampak dari faktor-faktor seperti kekurangan gizi, kepadatan penduduk, dan sanitasi yang buruk. Namun, perlu diperhatikan bahwa kelaparan dan wabah penyakit tidak selalu bersifat alami, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh tindakan manusia, terutama dalam hal administrasi pemerintahan dan kebijakan publik.

Selain itu, ada pandangan yang mengarah kepada fenomena negatif di akhir kekuasaan Monarki Mamaalik, seperti korupsi dan pemborosan. Kelemahan dalam

administrasi dan tata kelola pemerintahan dapat memperburuk kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jika terjadi korupsi dan pemborosan sumber daya, maka kebijakan publik yang seharusnya menjaga kesejahteraan rakyat dapat menjadi tidak efektif, mengakibatkan dampak negatif yang lebih besar.

Oleh karena itu, untuk memahami lebih jelas peran faktor alam dan dampak tindakan manusia dalam kehancuran Monarki Mamaalik, perlu dilakukan penelitian yang komprehensif dan multi dimensional. Ini melibatkan analisis terhadap aspek-aspek seperti kondisi ekonomi, administrasi pemerintahan, kebijakan publik, serta faktor-faktor alam yang mungkin memengaruhi keadaan tersebut.

Syafawi Persia

Sejarah Iran, yang sebelumnya dikenal sebagai Kerajaan Persia, memiliki perkembangan yang panjang dan beragam. Pergantian sebutan dari Persia menjadi Iran pada tahun 1935 mencerminkan salah satu babak penting dalam sejarah modern negara tersebut.

Pada awalnya, sebutan Persia dikenal sebagai nama yang digunakan oleh bangsa Iran dan dunia internasional. Namun, pada masa kekuasaan Raja Reza Khan pada tahun 1935, dia mengumumkan bahwa nama negara tersebut akan diubah menjadi Iran. Keputusan ini didorong oleh beberapa pertimbangan, termasuk semangat nasionalisme dan upaya untuk menghilangkan asosiasi dengan sejarah feodal dan kolonial.

Sejarah Islam di Iran dimulai pada tahun 637 M selama Perang Qadisiyyah dan peperangan Nahavand. Pada saat itu, pasukan Muslim di bawah pimpinan Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Persia dan membawa masuk Islam ke wilayah tersebut. Peperangan Nahavand pada tahun 641 M menandai jatuhnya seluruh Imperium Persia yang dipimpin oleh Raja Yazdajird ke tangan Muslimin.

Setelah penaklukan tersebut, agama Islam menyebar di Iran, menggantikan agama Zoroaster yang sebelumnya dominan. Proses ini membawa perubahan budaya, sosial, dan politik yang signifikan dalam sejarah Iran. Puncaknya, Islam menjadi pondasi bagi identitas Iran modern, meskipun dengan nuansa dan kekayaan budaya yang tetap melekat.

Penting untuk dicatat bahwa perubahan sebutan dari Persia menjadi Iran pada tahun 1935 bukan hanya sebatas perubahan nama, tetapi juga mencerminkan transformasi sosial dan politik yang lebih luas dalam sejarah modern Iran.

Pada abad ke-9 dan ke-10 M, wilayah Persia mengalami perubahan kekuasaan dengan munculnya dinasti-monarki seperti Samanid, Gaznawi, dan Saljuk. Pada awalnya, wilayah Persia secara praktis berada di bawah kekuasaan penuh Kekhalifahan di Baghdad pada tahun 820 M. Namun, seiring berjalannya waktu, dinasti-monarki lokal mulai muncul dan mengambil alih kendali di berbagai wilayah Persia.

Monarki Samanid, yang berkuasa dari tahun 892 hingga 999 M, adalah salah satu monarki pertama yang muncul di Persia. Mereka mendirikan pemerintahan otonom di Khurasan, wilayah timur Persia. Sementara itu, Monarki Gaznawi (999-1037 M.) dan Monarki Saljuk (1037-1157 M.) juga ikut berperan dalam mengubah peta kekuasaan di Persia.

Selain itu, Monarki Tahiriyy (820-872 M.) didirikan di Khurasan setelah Khalifah al-Makmun memberikan wewenang kepada panglima perangnya, Tahir bin Husain. Monarki ini menjadi salah satu monarki awal yang muncul setelah perubahan kekuasaan di wilayah tersebut.

Sementara itu, Monarki Safawi muncul pada periode belakangan di Persia. Ismail, pendiri Monarki Safawi, berasal dari keluarga Tarekat Safawiyah yang memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut. Monarki Safawi memainkan peran penting dalam sejarah Persia, terutama di bidang politik dan agama.

Perubahan dan pergantian monarki ini mencerminkan dinamika kompleks dalam sejarah Persia, yang terus berkembang melalui berbagai periode dan monarki yang berkuasa.

Cerita tentang Monarki Safawi diawali dengan Ali, putra dan pengganti Haidar, yang dibebaskan bersama saudaranya Ibrahim dan Ismail oleh Rustam, putra mahkota Ak-Koyunlu. Ali bersaudara kemudian kembali ke Ardabil, tetapi hubungan dengan Rustam tidak berlangsung lama, dan Rustam malah berbalik memusuhi mereka, menyerang dan menyebabkan Ali terbunuh pada tahun 1494 M.

Setelah kematian Ali, kepemimpinan gerakan Safawiyah dilanjutkan oleh Ismail, yang saat itu baru berusia tujuh tahun. Selama lima tahun, Ismail bersama pasukannya berkumpul di Gilan, mempersiapkan kekuatan, dan menjalin kontak dengan pengikut-pengikutnya di Azerbaijan, Suriah, dan Anatolia. Pasukan yang dipersiapkan oleh Ismail dinamakan Qizilbash, yang berarti baret merah.

Pada tahun 1501 M, pasukan Qizilbash yang dipimpin oleh Ismail berhasil mengalahkan Ak-Koyunlu dalam pertempuran dekat Nakhchivan. Kemenangan ini membuka jalan bagi mereka untuk merebut Tibriz, pusat kekuasaan Ak-Koyunlu. Di Tibriz, pada tahun yang sama, Ismail memproklamasikan berdirinya Monarki Safawi dan menobatkan dirinya sebagai raja pertama.

Monarki Safawi kemudian mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Abbas I. Monarki ini memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan budaya, terutama dalam seni, ilmu pengetahuan, dan arsitektur. Selain itu, mereka juga memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Syi'ah di wilayah tersebut. Monarki Safawi membawa kemajuan signifikan di berbagai bidang, mencakup politik, militer, ekonomi, dan pendidikan:

Bidang Politik dan Militer:

Monarki Safawi, di bawah pemerintahan Ismail I, berhasil melakukan ekspansi wilayah kekuasaan. Meskipun ada periode kemandekan pada masa pemerintahan Tahmasp I, Ismail II, dan Khudabanda, namun Abbas I berhasil mengatasi krisis ini dengan mentransformasi sistem politik melalui konsolidasi kekuatan militer.

Bidang Ekonomi:

Stabilitas politik yang diperoleh pada masa pemerintahan Abbas I merangsang pertumbuhan ekonomi Monarki Safawi. Penaklukan kepulauan Hurmuz dan transformasi pelabuhan Gumrun menjadi Bandar Abbas memberikan kekuasaan Safawiyah atas jalur perdagangan antara Barat dan Timur. Selain sektor

perdagangan, Monarki Safawi juga mengalami kemajuan dalam pertanian, terutama hasil pertanian dari Sabit yang sangat subur.

Bidang Pendidikan:

Kemajuan ekonomi membuka jalan bagi perkembangan pendidikan dan seni. Tradisi ilmu pengetahuan yang telah berakar dalam sejarah Persia terus berkembang pesat pada masa Monarki Safawi. Banyak ilmuwan terkemuka, seperti Baharuddin al-Syaroezi, Sadaruddin al-Syaroezi, dan Muhammad al-Baqir ibn Muhammad Damar, lahir dan berkontribusi dalam bidang filsafat, sejarah, teologi, dan ilmu pengetahuan umum.

Namun, kejayaan Monarki Safawi tidak bertahan lama setelah pemerintahan Abbas I. Penguasa-penguasa berikutnya cenderung lemah, dan kemunduran bertahap membawa monarki ini ke arah kehancuran. Meskipun demikian, perlu diapresiasi bahwa Monarki Safawi meninggalkan warisan berharga yang mencerminkan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan pada masa silam.

Mughol India

India memiliki sejarah yang sangat kaya dan kompleks, dengan berbagai pengaruh budaya, agama, dan kekuasaan yang membentuk perkembangannya. Monarki Mughol, yang mencakup periode yang cukup panjang dari 1526 hingga 1857 M, adalah salah satu monarki Islam terkemuka yang memerintah di India dan meninggalkan jejak penting dalam sejarah dan kebudayaan India. Berikut adalah gambaran singkat tentang Monarki Mughol:

1. Pendiri Monarki Mughol - Babuur (1526-1530 M)
Babuur adalah pendiri Monarki Mughol yang berasal dari Turki-Mongol. Ia berhasil memenangkan Pertempuran Panipat pada tahun 1526 dan mendirikan Kekaisaran Mughol di India.
2. Keberagaman Budaya: Monarki Mughol menunjukkan toleransi terhadap keberagaman budaya dan agama. Kaisar-kaisar Mughol menggabungkan elemen-elemen kebudayaan Islam dengan kekayaan budaya India.
3. Kemegahan di Bawah Kaisar Akbar (1556-1605 M)
Kaisar Akbar dikenal sebagai penguasa yang bijaksana dan maju. Ia memprakarsai kebijakan toleransi agama, membangun infrastruktur, dan mendukung seni dan sastra. Monarki Mughol sebagai Pusat Kebudayaan: Era Akbar dikenal sebagai masa keemasan kebudayaan Mughol, dengan berkembangnya seni arsitektur, seni lukis, dan sastra.
4. Periode Kemunduran dan Ketinggian Kembali di Bawah Shah Jahan (1628-1658 M)
Shah Jahan: Kaisar Shah Jahan dikenal sebagai pembangun Taj Mahal, monumen indah yang dihasilkan sebagai tanda cinta kepada istrinya Mumtaz Mahal. Kemunduran Ekonomi: Meskipun kemegahan arsitektur dan seni terus berkembang, periode ini juga menyaksikan tekanan ekonomi dan pajak yang berat terhadap rakyat.
5. Periode Kemunduran Lanjutan dan Akhir Monarki (1658-1857 M)

Penurunan Ekonomi dan Pemerintahan yang Lemah: Kaisar-kaisar yang mengikuti, terutama pada periode akhir, menghadapi penurunan ekonomi, perpecahan internal, dan tekanan dari kekuatan Eropa. Pemberontakan Sepoy (1857): Monarki Mughol berakhir setelah Pemberontakan Sepoy pada tahun 1857, yang mengakhiri pemerintahan langsung oleh Kekaisaran Mughol.

Warisan Monarki Mughol di India

Monarki Mughol meninggalkan warisan yang signifikan di India, termasuk diantaranya :

- a. Arsitektur Megah: Taj Mahal, Fatehpur Sikri, dan Benteng Delhi adalah contoh arsitektur megah dari era Mughol.
- b. Seni dan Sastra: Pengembangan seni lukis miniatur, puisi, dan sastra.
- c. Toleransi Agama: Kebijakan toleransi agama yang diperkenalkan oleh Akbar.
- d. Sistem Tata Negara: Beberapa prinsip tata negara Mughol, seperti sistem tata negara dan administrasi, memengaruhi perkembangan selanjutnya di India.

Meskipun Monarki Mughol berakhir pada abad ke-19, warisan budaya, arsitektur, dan kebijakan pemerintahannya tetap memainkan peran penting dalam sejarah India dan membentuk identitas India yang beragam. Sejarah Monarki Mughol mencerminkan kekayaan dan kompleksitas perjalanan India pada masa itu. Berikut adalah ringkasan lebih lanjut mengenai berdirinya dan perkembangan Monarki Mughol:

Pemberontakan Sepoy dan Akhir Monarki Mughol

Pemberontakan Sepoy (1857) ini menandai akhir pemerintahan langsung oleh Monarki Mughol. Meskipun Monarki Mughol berakhir, warisan budaya, seni arsitektur, dan pengaruh politiknya tetap terlihat di India hingga hari ini.

Dengan Monarki Mughol sebagai salah satu bagian penting dari sejarah India, perjalanan dan warisannya memainkan peran besar dalam membentuk karakter dan identitas negara tersebut.

Alam Khan, kerabat Ibrahim Lodi, dan Daulat Khan, Gubernur Lahore, mengirim utusan ke Kabul untuk meminta bantuan dari Babuur dalam menggulingkan pemerintahan Ibrahim Lodi di Delhi. Babuur dengan cepat menanggapi permintaan tersebut. Pada tahun 1525 M, Babuur berhasil menguasai wilayah Punjab dengan ibu kotanya Lahore. Setelah itu, dia memimpin pasukannya menuju Delhi. Pada tanggal 21 April 1526 M, terjadi pertempuran sengit di Panipat antara Ibrahim Lodi dan Zahiruddin Babuur, yang dikenal sebagai pertempuran Panipat I. Ibrahim Lodi tewas, dan kekuasaannya beralih ke tangan Babuur. Sejak saat itu, Daulah Mughol berdiri di India, dengan Delhi sebagai ibu kotanya.

Berdirinya Daulah Mughol memicu persatuan raja-raja Hindu Rajput di seluruh India, seperti Rana Sanga, yang bersatu untuk membentuk angkatan perang besar dan menyerang Babuur. Walaupun pasukan gabungan Hindu berusaha melawan, Babuur berhasil mengalahkannya. Sementara itu, di Afghanistan, masih terdapat kelompok yang loyal kepada keluarga Lodi. Mereka mengangkat adik kandung Ibrahim Lodi, yaitu Mahmud, sebagai sultan. Namun, Sultan Mahmud Lodi dengan

mudah dikalahkan oleh Babuur dalam pertempuran di dekat Gogra pada tahun 1529 M (Ahmed, 2003).

Pada tahun 1530 M, Babuur wafat pada usia 48 tahun, meninggalkan wilayah kekuasaan yang luas. Kekuasaan tersebut kemudian diwariskan kepada putranya, yakni Humayun. Selama pemerintahan Humayun (1530-1540 dan 1555-1556 M), negara menghadapi ketidakstabilan karena menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan dari musuh-musuhnya. Salah satu tantangan signifikan adalah pemberontakan Bahadur Shah, penguasa Gujarat, yang memisahkan diri dari Delhi. Pada tahun 1540 M, terjadi pertempuran dengan Sher Khan di Kanauj, di mana Humayun mengalami kekalahan dan terpaksa melarikan diri ke Kandahar, lalu menuju Persia.

Dalam masa pengasingan tersebut, Humayun mengorganisir kekuatannya dan mengenali tradisi Syi'ah. Pada periode tersebut, Persia dipimpin oleh penguasa Safawiyah yang bernama Tahmasp. Setelah menghabiskan lima belas tahun membangun kekuatannya selama pengasingan di Persia, Humayun kembali menyerang musuh-musuhnya dengan dukungan dari raja Persia. Dengan bantuan tersebut, Humayun berhasil mengalahkan Sher Khan setelah lima belas tahun perjalanan menjauh dari Delhi. Ia kembali ke India dan merebut kembali takhta kekaisaran Mughol pada tahun 1555 M.

Pada tahun 1556, Humayun wafat setelah terjatuh dari tangga istananya pada bulan Januari, dan kemudian digantikan oleh putranya, Akbar Khan. Akbar Khan, yang naik tahta pada usia 15 tahun, pada awal pemerintahannya menyerahkan urusan kenegaraan kepada Bairam Khan, seorang penganut Syi'i. Awal masa pemerintahan Akbar ditandai dengan berbagai pemberontakan. Bairam Khan harus menghadapi sisa-sisa pemberontakan keturunan Sher Khan yang masih berkuasa di Punjab. Selain itu, ancaman pemberontakan terhadap pemerintahan Akbar muncul dari seorang penguasa Gwalior dan Agra.

Ketika pasukan Hemu mencoba memasuki kota Delhi, Bairam Khan menanggapi pemberontakan tersebut dengan memimpin pasukan besar. Pertempuran antara kedua pihak dikenal sebagai pertempuran Panipat II pada tahun 1556 M. Pasukan yang dipimpin oleh Bairam Khan berhasil memenangkan pertempuran ini, sehingga wilayah Agra dan Gwalior dapat dikuasai sepenuhnya (Yatim 2002:147-149).

Setelah Akbar mencapai kedewasaan, ia berupaya untuk menghilangkan pengaruh yang sangat kuat dari Bairam Khan, yang terlalu memaksakan kepentingan aliran Syi'ah. Bairam Khan mencoba memberontak, namun usahanya berhasil dipadamkan oleh Akbar di Jullundur pada tahun 1561 M.

Setelah berhasil menyelesaikan masalah dalam negeri, Akbar mulai melakukan ekspansi wilayah. Ia berhasil menguasai berbagai daerah, termasuk Chundar, Ghond, Chitor, Ranthabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgarh, Narhala, Admadnagar, dan Ashgar..

Seiring dengan pertumbuhan dan keberhasilan, Akbar dewasa kemudian berupaya menyingkirkan Bairam Khan, yang telah memiliki pengaruh yang sangat kuat dan terlalu memaksakan kepentingan aliran Syi'ah. Bairam Khan mencoba memberontak, namun usahanya dapat dikalahkan oleh Akbar di Jullundur pada tahun 1561 M.

Setelah berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan dalam negeri, Akbar memulai ekspansi wilayahnya. Dia berhasil menguasai sejumlah daerah, termasuk Chundar, Ghond, Chitor, Ranthabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgarh, Narhala, Admadnagar, dan Ashgar. Pada masa pemerintahan Akbar, terjadi kemajuan signifikan dalam ilmu pengetahuan dan peradaban. Pertumbuhan ekonomi tercermin dari perkembangan sektor pertanian dan perindustrian.

Setelah Akbar, penguasa berikutnya adalah Jahangir (1605-1628 M), putra Akbar. Jahangir adalah penganut ahlusunnah wal jamaah. Pemerintahan Jahangir ditandai oleh beberapa pemberontakan, termasuk pemberontakan di Ambar yang sulit dipadamkan. Pemberontakan juga muncul dari dalam istana yang dipimpin oleh Kurram, putranya sendiri. Dengan bantuan panglima Muhabbat Khar, Kurram berhasil menangkap dan menyekap Jahangir.

Namun, berkat upaya permaisuri, permusuhan antara ayah dan anak berhasil didamaikan. Setelah kematian Jahangir, Kurram naik takhta dengan gelar Muzaffar Shahabuddin Muhammad Shah Jehan Padishah Ghazi. Pemerintahan Shah Jehan (1627-1658 M) ditandai oleh munculnya pemberontakan dan perselisihan di antara anggota keluarganya sendiri. Adiknya, Syahriar, bahkan mendeklarasikan diri sebagai kaisar di Lahore, tetapi Shah Jehan berhasil menyelesaikan pemberontakan tersebut.

Pada pemberontakan tahun 1657 M, Shah Jehan mengalami sakit, dan terjadi persaingan antara anak-anaknya dalam rangka untuk mendapatkan gelar kaisar. Dalam persaingan tersebut, Aorangzeb berhasil memenangkan pertarungan setelah mengalahkan saudara-saudaranya, Dara, Sujak, dan Murad (Mahmudunnasir, 1994, p. 369).

Aorangzeb, Sultan Mughol terakhir yang memerintah dari tahun 1658 hingga 1707 M, memegang gelar Alamgir Padshah Ghazi. Dia dikenal sebagai penguasa yang pemberani dan bijaksana, sejalan dengan kebesaran raja pendahulunya, Akbar. Pada tahap akhir masa pemerintahannya, Aorangzeb berhasil menguasai Deccan, Bangla, dan Aud. Sistem pemerintahannya menunjukkan perbedaan yang signifikan dari pemerintahan yang ada sebelumnya, khususnya dalam konteks hubungannya dengan masyarakat Hindu.

Aorangzeb, sebagai penguasa Mughol, mengubah kebijakan konsiliasi terhadap Hindu dengan mengimplementasikan beberapa kebijakan pada tahun 1659 M. Beberapa langkahnya termasuk larangan terhadap minuman keras, perjudian, prostitusi, dan penggunaan narkotika. Pada tahun 1664, dia mengeluarkan dekret yang melarang praktik sati, yakni pembakaran diri seorang janda setelah suaminya meninggal, tanpa kemauan yang bersangkutan. Praktik ini kemudian dihapus secara resmi selama masa penjajahan Inggris. Aorangzeb juga memberlakukan larangan pertunjukan musik di istana, memberikan poll-tax untuk non-Muslim agar bisa memilih (1668 M), memerintahkan perusakan kuil-kuil Hindu, dan mendukung pengkodifikasian hukum Islam yang dikenal sebagai Fatwa Alamgiri.

Tindakan-tindakan tersebut menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat Hindu dan memicu pemberontakan pada masanya. Meskipun Aorangzeb berhasil meredam beberapa pemberontakan, namun tidak sepenuhnya sukses. Saat

Aorangzeb meninggal pada tahun 1707 M, banyak wilayah yang memisahkan diri dari Kekaisaran Mughol, dan pemberontakan oleh kelompok Hindu terus berlanjut.

Setelah wafatnya Aorangzeb, kepemimpinan Daulah Mughol dipegang oleh para sultan yang kurang kuat, yang tidak mampu mempertahankan eksistensi Kekaisaran Mughol. Pada akhirnya, Daulah ini mencapai akhirnya di bawah pemerintahan raja terakhir, Bahadur Shah II (1837-1858 M). Masa keemasan peradaban dan pemikiran Islam selama pemerintahan Akbar dan tiga penerusnya, yaitu Jehangir, Syah Jehan, dan Aorangzeb, menjadi landasan bagi kemajuan tersebut. Sayangnya, perkembangan tersebut tidak dapat dipertahankan oleh penguasa-penguasa yang datang setelah mereka.

Pada masa pemerintahan Syah Jehan, banyak orang Portugis menetap di Hugli, Bengala, dan mereka dieksploitasi dengan dikenakan pajak dan upaya penyebaran agama Kristen. Setelah wafatnya Syah Jehan pada tahun 1658 M, terjadi persaingan di istana untuk merebut takhta. Akhirnya, kerajaan Mughol terbagi menjadi beberapa wilayah, termasuk klaim Shuja sebagai Raja di Bengala dan Murad sebagai Raja di Ahmadabad. Shuja berupaya menguasai pemerintahan Delhi, namun pasukan Aorangzeb berhasil mengalahkannya pada tahun 1658 M.

Kemudian, Aorangzeb memerangi pasukan Murad dan berhasil meraih kemenangan. Akibatnya, Aorangzeb secara resmi dinobatkan sebagai Raja Mughol. Selama masa Monarki Mughol, terdapat beberapa kemajuan dalam peradaban dan keilmuan, antara lain:

Bidang Politik dan Administrasi Pemerintah

Pada masa pemerintahan Akbar, prestasi diraih melalui implementasi kebijakan Sulakhul atau toleransi universal. Keberhasilannya tercermin dalam perluasan wilayah kekuasaan, melibatkan Chubdar, Ghond, Chitor, Kashmir, Bengal, Bihar, Gujarat, Orissa, Deccan, Gawilgarh, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah. Upaya ini berlanjut hingga masa pemerintahan Aorangzeb. Akbar menetapkan kebijakan-kebijakan penting, termasuk perancangan sistem pemerintahan yang melibatkan sistem militer di seluruh daerah taklukannya. Administrasi daerah diorganisir dengan kepemimpinan seorang sipah salar (kepala komandan) untuk tingkat distrik dan faudjar (komandan) untuk tingkat sub-distrik. Seiring dengan itu, landasan institusional dan geografis dibentuk untuk memperkuat kekuatan imperium. Pemerintahan Mughol pada umumnya dipimpin oleh elit militer dan politik dengan latar belakang yang beragam, termasuk dari Iran, Turki, Afghanistan, dan Muslim asli India (Thohir, 2004, p. 205).

Bidang Ekonomi dan Sosial

Kemantapan stabilitas politik yang diterapkan oleh Akbar membawa dampak positif pada sektor lainnya, khususnya ekonomi. Kerajaan Mughol berhasil mengembangkan program-program di bidang pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Fokus utama program tersebut adalah pada sektor pertanian, di mana hubungan antara pemerintah dan petani diatur dengan baik. Sistem ini melibatkan unit-unit lahan pertanian kecil yang tergabung dalam pargana (desa). Mukkadam memimpin komunitas petani dan berperan sebagai perantara antara pemerintah dan

petani. Setiap petani memiliki tanggung jawab untuk menyumbangkan hasil pertaniannya, sehingga mereka mendapatkan perlindungan dari kejahatan. Hasil pertanian meliputi biji-bijian, kacang-kacangan, tebu, sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, dan bahan-bahan pewarna. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, hasil pertanian juga diekspor ke Eropa, Arabia, dan Asia Tenggara. Di samping itu, hasil kerajinan seperti kain tenun dan kain tipis dari bahan Gordyin diproduksi secara masif di Gujarat dan Bengal. Pada masa pemerintahan Syah Jehan, pembangunan ekonomi diawali dengan pengembangan sistem irigasi. Sistem perpajakan yang baik dikelola sesuai dengan sistem zabt, dan industri pertanian serta perdagangan mulai berkembang.

Bidang Seni dan Budaya

Pada masa Monarki Mughol, terutama pada masa pemerintahan Akbar, pencapaian terbesar dalam bidang seni adalah pembangunan Istana Fatehpur Sikri di Sikri, serta pembangunan vila dan masjid-masjid yang memukau. Pada masa pemerintahan Syah Jehan, seni mencapai puncaknya dengan pembangunan berbagai struktur megah seperti masjid berlapis mutiara, Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan Istana di Lahore (Yatim, 2002, hal. 150-151).

Pada masa Aorangzeb, seni terus berkembang dengan munculnya karya seni lukis, gubahan syair, dan kehadiran sejarawan. Meskipun masa pemerintahan Aorangzeb ditandai dengan kebijakan yang lebih konservatif, namun perkembangan seni dan budaya masih tetap berlanjut, menciptakan warisan seni yang kaya dan beragam.

Bidang Agama

Masuknya Islam ke India memunculkan sejumlah konflik terkait perbedaan kepercayaan, yang wajar mengingat wilayah tersebut merupakan tempat berkembangnya dua agama besar, yaitu Hindu dan Islam. Para penguasa Islam, yang berusaha menerapkan keadilan dalam pelaksanaan ibadah, kadang menghadapi kesulitan karena munculnya kecurigaan dan kesalahpahaman politik di antara pemeluk agama tersebut. Sultan Akbar mencoba melakukan akomodasi antara kedua agama ini melalui ajaran baru Din Illahi pada tahun 1582 M, namun usahanya tidak mendapat respon positif dari para ulama Islam.

Upaya lain yang dilakukan Akbar termasuk pernikahannya dengan seorang Hindu, dengan harapan mengurangi pertentangan antara dua agama besar di India. Meskipun perbedaan kasta muncul sebagai hasil dari perkawinan tersebut, namun hal ini dapat dianggap menguntungkan perkembangan Islam. Seiring waktu, muncul aliran kepercayaan baru seperti Syi'ah. Pada masa pemerintahan Aorangzeb, risalah hukum Islam juga diperkenalkan.

Konflik antara Islam dan Hindu mendorong munculnya aliran kepercayaan baru, termasuk agama Sikh pada abad ke-15. Sikhisme, yang merupakan sinkretisme antara Islam dan Hindu, didirikan oleh Guru Nanak (1469-1539 M). Agama Sikh terus berkembang di bawah kepemimpinan guru-guru selanjutnya, seperti Guru Govind Singh (1675-1708 M). Meskipun dihadapi tantangan dari umat Islam dan Hindu,

penganut Sikh berhasil membentuk identitas tersendiri dan membangun kekuatan baru di Asia Selatan.

Bidang Pengetahuan

Pada masa ini, banyak buku ensiklopedia dan kumpulan ilmu pengetahuan lahir, sehingga sering disebut sebagai zaman mausu'at. Dalam periode ini, juga muncul pemikir-pemikir baru, tetapi ijtihad mereka terbatas pada mazhab (Hasyim, 1975, p. 308). Kemunduran peradaban dan pemikiran Islam pada masa Monarki Mughol disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughol.
- b. Kemerostan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik, menyebabkan pemborosan dalam penggunaan uang negara.
- c. Pendekatan Aorangzeb yang terlampau kasar dalam menerapkan ide-ide puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sulit diatasi oleh para sultan sesudahnya.
- d. Semua pewaris tahta kerajaan pada fase terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan, sehingga tidak mampu mengatasi kemerostan politik dalam negeri (Yatim, 2002: 163).

KESIMPULAN

Sejarah kebijakan fiskal dalam Islam selama masa Fathimiyah dan Mamaalik di Mesir, Syafawiyah di Persia, serta Mughol di India, dapat dibagi menjadi dua fase utama: fase kejayaan dan fase kemunduran. Pada fase kejayaan, catatan sejarah menunjukkan bahwa manajemen fiskal di bawah pemerintahan kekhalifahan-khalifahan tersebut menghasilkan surplus pendapatan. Keadaan ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Fathimiyah, Mamaalik, Syafawiyah, dan Mughol di India menerapkan kebijakan fiskal yang mendorong peningkatan pendapatan negara dari sektor-sektor beragam seperti pertanian, perdagangan, dan industri. Sumber pendapatan terbesar negara berasal dari pajak, *tīmār*, *muḳāṭa'a*, perwakafan, dan *ghanimah*.

Pendapatan yang tinggi digunakan untuk mendukung kemajuan negara melalui pembiayaan perluasan wilayah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, pada fase kemunduran, Fathimiyah, Mamaalik, Syafawiyah, dan Mughol mengalami defisit anggaran. Penurunan pendapatan negara, kegagalan westernisasi perekonomian, biaya perang yang tinggi, dan tingginya utang negara menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya defisit dalam kebijakan fiskal mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. A. (1979). *Sejarah Islam dan Ummatnya*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Amin, A. (1936). *Duha al-Islam (The Morning of Islam)*. Cairo: Lajnat al-Ta'lif wa al-Tarjama wa al-Nashr.
- Ahmed, A. S. (2003). *Rekonstruksi Sejarah Islam: Di Tengah Pluralitas Agama dan Peradaban* (A. Nst, trans.). Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

- Amin, S. M. (2015). *Sejarah Peradaban Islam*. Amzah.
- As-Sirjani, R. (2011). *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Esposito, J. L. (2004). *The Islamic World: Abbasid caliphate-Historians* (Vol. 1). Oxford University Press.
- Adonis. 2009. *As- Sabit wa al-Mutahawwil: Bahs} fi al-Ibda' wa al-Itba' inda al-Arab* (Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab). Translated by Khoirun Nahdiyyin. Yogyakarta: LkiS.
- Bosworth, C.E. 1993. *The Islamic Dynasties*, Cet I. Terjemahan oleh Ilyas Hasan. Bandung: Mizan.
- BriU's, EJ. 1987. *First Encyclopaedia of Islam*. Vol. V. New York: T.p.
- Bayat, Asef. 2001. *Pos Islamisme*. Yogyakarta: LkiS.
- Esposito, John L. 2002. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan.
- Fahrudin, Fuad Moh. 1985. *Perkembangan Kebudayaan Islam*. Cetakan I. Jakarta: Bulan Bintang.
- Goitein, S.D. 1968. *Studies in Islamic History and Institution*. Leiden: EJ. Brill.
- Grunebaum, G.E. Von. 1970. *Classical Islam a History*. Cetakan I. London: George Alien & Unwim.
- Hamka. (1975). *Sejarah Ummat Islam III*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasyim, A. (1975). *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hassan, Ibrahim. 1989. *Islamic History and Culture*, Djahdan Humam (Penj.), *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Cetakan I. Yogyakarta: Kota Kembang.
- Hasan, H. I. (1958). *Tarikh al-Daulah al-Fatimiyyah Fi al-Magrib, wa Misr, wa Suriyah wa Bilad al-Arab*. Cairo: Kuttub al-Fatimiyyin.
- Hitti, P. K. (1974). *History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present*. The Macmilland Press Ltd.
- Ismail, H. F. (2017). *Sejarah & Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII-XII M)*. IRCiSoD.
- Karim, M. A. (2012). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara.
- Khadduri, Majid. 1999. *The Islamic Conception of Justice*. Translated by Mochtar Zoeni and Joko S Kahhar. Surabaya: Risalah Gusti.
- Lapidus, I. M. (2014). *A history of Islamic societies*. Cambridge University Press.
- Nurhakim, M. (2020). *Sejarah & peradaban Islam*.
- Lapidus, Ira M. 2000. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mufrodi, Ali. 1999. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Mahmudunnasir, S. (1994). *Islam Konsepsi dan Sejarahnya* (A. Affandi, trans.). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- P. Yatim, B. (2002). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Redaksi, D. (1994). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Islam Baru van Houeve.
- Salim, al-S. A. A. S. dan S. al-S. A. A. (2015). *Sejarah Bangsa Mesir, Cet. I*. Pustaka al-kautsar.
- Sanders, P. (1994). *Ritual, Politics, and the City in Fatimid Cairo* (*Suny Series in Medieval Middle East History*). State University of New York Press.
- Sayyid, D. A. F. (1992). *Daulat Fathimiyah fi Misr Tafsir Jadid*. Cairo: Dar El Masriyah Lil Bananiyah.
- Sulasman, S. (2013). *Sejarah Islam di Asia dan Eropa (dari masa klasik hingga masa modern)*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Sunanto, M. (2007). *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*. Kencana PrenadaMedia Group.
- Sihbudi, Riza. 1989. *Dinamika Revolusi Iran*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Thohir, A. (2009). *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam* (Vol. 1, Issue 1). RajaGrafindoPersada.
- Thohir, Ajid. 2009. *Studi Kawasan Dunia Islam: Perspektif Etno Linguistik dan Geo Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thohir, A. (2004). *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam Mencetak Akar-akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo
- Thabathaba'i, Muhammad Husayn. 1989. *Shi'ite Islam (Sy'ah: Asal Usul dan Perkembangannya)*. Translated by Djohan Efendi. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Watt, W. M. (1990). *Kejayaan Islam: kajian kritis dari tokoh orientalis*. PT. Tiara Wacana Yogya.
- Yamani. 2002. *Filsafat Islam antara Al-Farabi dan Khomeni*. Jakarta: Mizan.
- Zubaidah, S. (2016). *Sejarah Peradaban Islam*. Medan: Perdana Publishing.